

Peran Dinas PMD dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Khansa Khairunnisa,

Dosen Pembimbing: Hendra Sukmana

Program Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2025



PENDAHULUAN

Latar Belakang

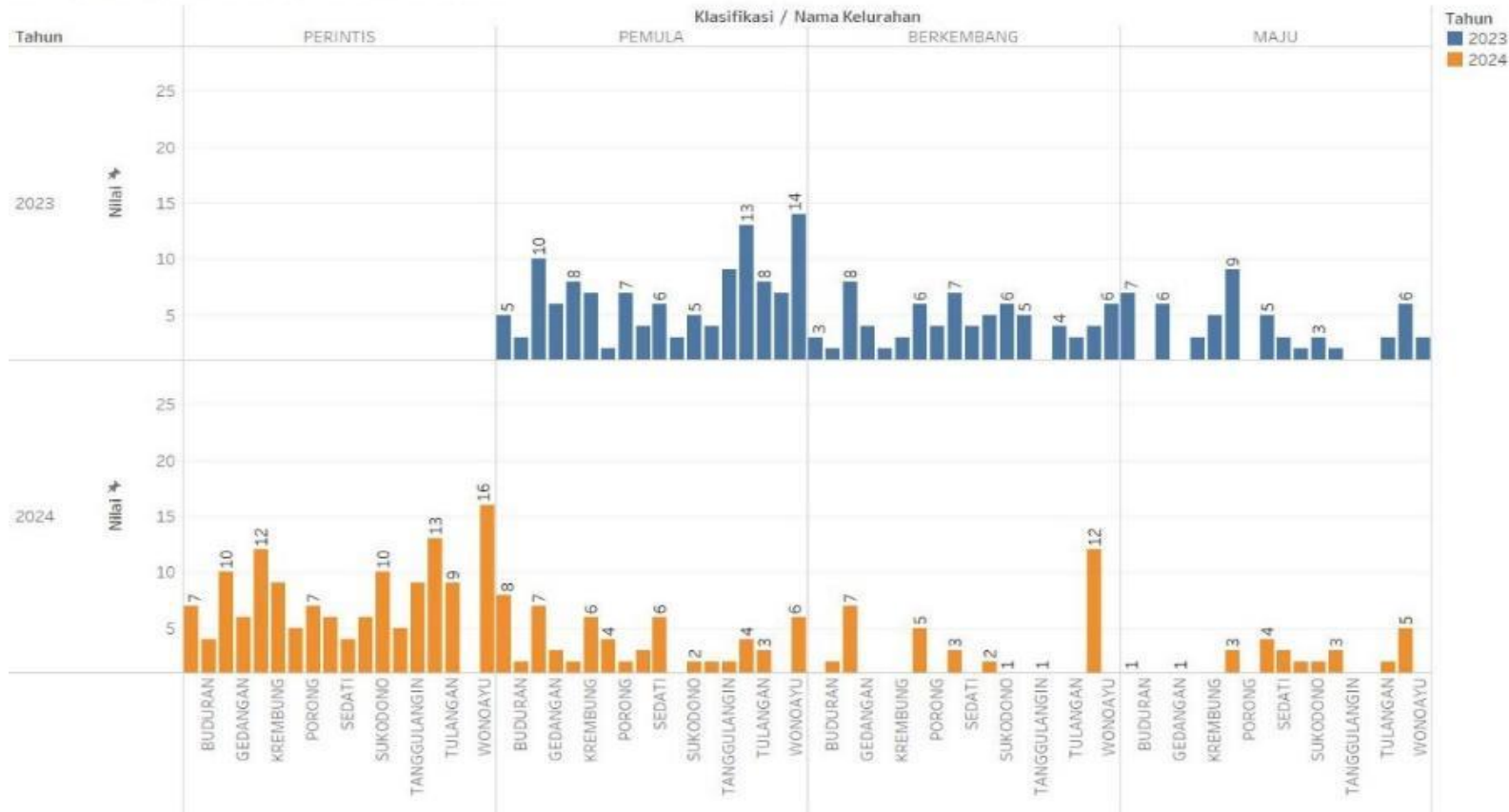
- BUMDesa punya peran strategis dalam Pembangunan Desa yang Berkelanjutan.
- Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), hingga awal tahun 2024, tercatat lebih dari 65.000 BUMDesa aktif di seluruh Indonesia. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan jumlah BUMDesa tertinggi, yakni mencapai lebih dari 8.000 unit.
- Namun demikian, keberhasilan BUMDesa di Jawa Timur tidak merata. Data terbaru menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% BUMDesa di Jawa Timur yang aktif dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian desa
- Kabupaten Sidoarjo, sebagai wilayah penyangga ekonomi Jawa Timur, memiliki 318 desa, namun hanya 268 yang memiliki BUMDesa aktif. Ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi. Oleh karena itu, keberadaan dan intervensi Dinas PMD sangat penting dalam mendampingi proses tumbuh-kembangnya BUMDesa di daerah ini.

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah BUMDesa
1	Tarik	20	18
2	Prambon	20	16
3	Krembung	19	16
4	Porong	12	11
5	Jabon	13	15
6	Tanggulangin	18	12
7	Candi	24	24
8	Tulangan	22	14
9	Wonoayu	23	23
10	Sukodono	19	15
11	Sidoarjo	10	10
12	Buduran	15	8
13	Sedati	16	14
14	Waru	17	17
15	Gedangan	15	11
16	Taman	16	11
17	Krian	19	17
18	Balombangendo	20	16
Jumlah		318	268

PENDAHULUAN DATA EMPIRIS

Rekapitulasi Klasifikasi BUMDesa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2024

DATA BUMDES KABUPATEN SIDOARJO



Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis bahwa BUMDesa yang berada di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan yang signifikan dalam masing-masing klasifikasi, mulai dari perintis, pemula, berkembang, sampai dengan maju. Penurunan tersebut terjadi karena ada penyesuaian aturan, meliputi klasifikasi BUMDesa, indikator klasifikasi BUMDesa, dan unit usaha BUMDesa. Klasifikasi BUMDesa sebelum penyesuaian terdiri dari 3 klasifikasi (pemula, berkembang, maju), sedangkan setelah penyesuaian terdiri dari 4 klasifikasi (perintis, pemula, berkembang, maju). Indikator klasifikasi sebelum penyesuaian terdiri atas 10 indikator, sedangkan setelah penyesuaian terdiri atas 7 indikator. Unit usaha BUMDesa sebelum penyesuaian terdiri atas 21 kategori, sedangkan setelah penyesuaian terdiri atas 7 kategori (dengan sub kategori). Adanya penyesuaian tersebut bisa menyebabkan BUMDesa yang berada pada masing-masing klasifikasi sudah tidak sesuai dengan kriteria pada masing-masing klasifikasi.

PENDAHULUAN

Rumusan Masalah

- **Pertama**, belum ada revisi peraturan daerah terbaru yang mengatur terkait pembentukan BUMDesa, terakhir perda terkait BUMDesa ada di tahun 2019, padahal seharusnya sudah ada perda terbaru untuk menyesuaikan dengan peraturan pemerintah dan permendesa PDTT terbaru. = **Peran Regulator**
- **Kedua**, belum optimalnya pendampingan dan pembinaan yang diberikan karena keterbatasan anggaran, sumber daya manusia (pegawai), sarana prasarana yang memadai dari dinas = **Peran Fasilitator**
- **Ketiga**, belum maksimalnya dukungan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas PMD, hal tersebut dibuktikan dalam perencanaan kabupaten yaitu IKD (Indikator Kinerja Daerah) Dinas PMD pada RPJMD 2021-2026 bukan BUMDesa, sehingga hal tersebut berdampak pada perencanaan dibawahnya yaitu RPJMDes, yang belum memprioritaskan pengelolaan BUMDesa. = **Peran Katalisator**

PENDAHULUAN

Penelitian Terdahulu

1. Muflih Muhammad, 2023 berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah”

Peran DPMD di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dalam partisipasinya terhadap BUMDesa yang berkolaborasi dengan berbagai macam stakeholder telah terlaksana dengan baik mulai dari sisi **perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemanfaatan hasil**. Namun, terdapat kendala dalam partisipasi masyarakatnya yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan BUMDesa karena ternyata salah satu alasannya ada ketakutan sendiri terhadap masyarakat nanti dimanfaatkan demi kepentingan pribadi oleh pengurus BUMDesa, dalam hal ini peran DPMD untuk melaksanakan sosialisasi terkait BUMDesa kepada masyarakat masih belum dilakukan secara masif.

2. Putu Sunari Asih dan Putu Edgar Tanaya, 2023 berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Penguatan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum”

DPMD Kabupaten Badung mempunyai tiga peran penting dalam penguatan BUMDesa sebagai badan hukum yang terdiri dari **pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi** kepada BUMDesa. Peran pembinaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi. Peran fasilitasi tercermin melalui adanya pendidikan dan diklat dengan berbagi pengetahuan dan informasi kepada pengurus BUMDesa. Peran evaluasi direalisasikan melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

3. Yayat Hidayat, Omo Permana, Mungguh Subekti, 2024 berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Deskriptif di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung)”

Hasil penelitian berupa dua peran DPMD Provinsi Jawa Barat terhadap pemberdayaan masyarakat yang disalurkan melalui BUMDesa, yaitu peran **penyuluh dan fasilitator**. Peran pertama yaitu sebagai penyuluh. Dalam hal ini, DPMD ikut andil dalam memberikan arahan, bimbingan, saran, dan masukan kepada masyarakat tanpa memandang bulu, yang mana dikemas kedalam dua kegiatan yaitu pendampingan dan pembinaan serta pelaksanaan pelatihan. Peran kedua yaitu bertindak menjadi fasilitator yang diimplementasikan melalui penyediaan alat dan bahan pertanian seperti bibit, perkakas, polybag, dan kebutuhan lainnya.

PENDAHULUAN

Teori dan Indikator

Arif (dalam Nurdin, 2014) yang meliputi Peran Pemerintah sebagai **Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator**.

- ✓ Peran pemerintah sebagai **Regulator**, yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan).
- ✓ Peran Pemerintah sebagai **Dinamisator**, yaitu pemerintah menggerakkan partisipasi multi pihak (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah).
- ✓ Peran pemerintah sebagai **Fasilitator**, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjebatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah).
- ✓ Peran pemerintah sebagai **Katalisator**, yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi model sosial untuk pembangunan partisipasi.

METODE PENELITIAN

- **Tujuan Penelitian:** menganalisis dan mendeskripsikan secara terperinci serta mendalam peran Dinas PMD dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sidoarjo
- **Lokasi Penelitian:** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo
- **Jenis dan pendekatan Penelitian:** **Jenis Deskriptif** (peneliti dapat mendeskripsikan, menganalisis, dan menjawab permasalahan suatu fenomena atau peristiwa yang diamati dalam penelitian, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan) dan **Pendekatan Kualitatif** (penelitian menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau gambaran dan tindakan orang yang diamati)
- **Teknik Pengumpulan Data:** wawancara, observasi, dan dokumentasi
- **Sumber Data: Primer** (wawancara, observasi, dan dokumentasi) dan **Sekunder** (jurnal ilmiah atau media massa)
- **Fokus Penelitian:** memahami peran yang dilaksanakan Dinas PMD dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sidoarjo
- **Teknik Penentuan Informan:** *purposive sampling* (peneliti secara sengaja memilih individu atau subjek yang dianggap paling relevan atau memiliki karakteristik tertentu yang mendukung tujuan penelitian)
- **Informan Penelitian**
 1. Kepala Bidang yang membidangi BUMDesa tahun 2024 yaitu Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa = **Key Informan**
 2. Staf pengadministrasi umum bidang penataan dan kerjasama desa dan staf pengolah data dan informasi bidang PLKD
- **Teknik analisis data:** Teknik Analisis Data dari Miles dan Huberman (1994:12).

Pertama, Pengumpulan Data, pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kedua, Reduksi Data, reduksi data merupakan proses selektif yang berfokus pada penyerdehanaan abstraksi dan tranformasi data mentah pada penelitian sehingga mendapatkan ringkasan data penting.

Ketiga, Penyajian Data adalah Pengumpulan data dari semua informasi yang di dapat dilapangan dalam format yang konsisten dan mudah diakses. Dengan cara ini, memperoleh gambaran luas dan melakukan evaluasi secara keseluruhan menjadi lebih sederhana.

Keempat, Penarikan Kesimpulan adalah menyatukan semua data yang diperoleh peneliti di lapangan.

Hasil

a. Peran Regulator

- Dinas PMD belum optimal sebagai regulator karena **Perda terakhir tentang BUMDesa terbit pada 2019** (Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa) dan belum diperbarui untuk menyesuaikan regulasi pusat terbaru (PP No. 11 Tahun 2021 dan Permendesa No. 3 Tahun 2021).
- Regulasi lama dianggap belum cukup menjawab dinamika pengelolaan BUMDesa saat ini.

b. Peran Dinamisor

- Dinas PMD sudah optimal sebagai regulator karena berhasil mendorong **kerja sama BUMDesa dengan BULOG, ITS, dan BUMD**.
- Ada **upaya ekspor produk BUMDesa ke Australia yaitu BUMDesa Barengkrajan, Krian berupa scraf dan hijab** melalui kerja sama dengan ITS, menandakan potensi globalisasi produk desa.

Hasil

c. Peran Fasilitator

- Dinas PMD telah menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan, seperti:
 - Pelatihan SAKTIBUMDesa
 - Updating data DDC
 - Bimbingan teknis laporan pertanggungjawaban
- Namun, pelaksanaan belum optimal karena keterbatasan SDM, anggaran, dan prasarana (contoh: tidak punya gedung representatif, mobil dinas sering rusak).

d. Peran Katalisator

- Kajian potensi desa dilakukan dengan STIESIA untuk BUMDesa yang belum aktif.
- Namun hasil kajian **belum ditindaklanjuti** dan belum disosialisasikan ke desa.
- **BUMDesa tidak dimasukkan sebagai indikator kinerja daerah (IKD)** dalam RPJMD, menunjukkan rendahnya perhatian strategis.

Pembahasan

Analisis menunjukkan adanya **ketimpangan antar peran**:

- **Peran dinamisator berjalan baik**, terbukti dengan inisiasi kerja sama dan promosi produk.
- **Peran fasilitator sebagian berhasil**, tetapi masih terhambat aspek teknis dan kelembagaan.
- **Peran regulator dan katalisator belum optimal**, karena lemahnya regulasi daerah dan BUMDesa belum menjadi prioritas strategis.

Keempat peran Dinas PMD regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator **tidak bisa dipisahkan** satu sama lain. keefektifan tiap peran sangat bergantung pada bagaimana peran lain saling menopang secara sinergis.

Temuan Penting Penelitian

- Belum sinkronnya regulasi lokal dengan pusat menjadi hambatan utama.
- Kemitraan eksternal dapat terbentuk, tapi tidak semua BUMDes mampu menyesuaikan kapasitasnya.
- Keterbatasan SDM dan sarana di Dinas PMD menyebabkan pembinaan belum optimal.
- Kajian potensi desa yang belum ditindaklanjuti menunjukkan lemahnya tindak lanjut kebijakan.
- BUMDesa belum masuk prioritas RPJMD menyebabkan minimnya alokasi anggaran dan perhatian politis.

Kesimpulan

Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo memainkan peran krusial melalui empat fungsi utama. Berdasarkan hasil penelitian, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dapat dijelaskan melalui empat peran sebagai berikut:

- **Pertama yaitu peran regulator.** Di Kabupaten Sidoarjo, pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara normatif tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Pembentukan dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.
- **Kedua yaitu peran Dinamisator.** Dinas PMD aktif memfasilitasi kemitraan antara BUMDesa dengan pihak eksternal, seperti BULOG, ITS, dan BUMD. Selain itu, Dinas PMD juga berupaya mempromosikan produk BUMDesa agar menembus pasar internasional, salah satunya melalui dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan ITS, yang memfasilitasi promosi produk unggulan seperti dari BUMDes Barengkrajan ke Australia.
- **Ketiga yaitu peran Fasilitator.** Dinas PMD telah menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan seperti, pelatihan laporan keuangan berbasis SAKTIBUMDESA bekerjasama dengan BPKP Provinsi Jawa Timur, fasilitasi updating Data Desa Center (DDC) Provinsi Jatim dan Legalitas BUMDesa, bimbingan teknis percepatan updating DDC BUMDesa Kabupaten Sidoarjo, pendampingan percepatan dokumen pencairan dan Laporan Pertanggungjawaban BKK Pemberdayaan BUMDesa Provinsi Jawa Timur 2024 bagi BUMDesa penerima BKK, serta penyesuaian pendataan BUMDesa di DDC Provinsi Jatim dengan KEPMENDESA PDRTT 145/2022.
- **Keempat yaitu Peran Katalisator.** Dinas PMD telah berupaya mempercepat pengembangan potensi daerah melalui kerja sama dengan STIESIA dalam kajian potensi terhadap 18 desa yang disaring dari 52 desa non-DDC yang dinilai tidak aktif.

Referensi

- [1] Prasetyo, A.A and Sukmana, H. (2024). ‘Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Sumber Gempong di Desa Ktapanrame’, Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(5), pp. 2732-2750.
- [2] Muliyani, F. (2022). ‘Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Selat Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah’, pp. 1-8.
- [3] Nawawi, S. (2022). ‘Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Mengoptimalkan BUMDES Untuk Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Pohuwato’, pp. 1-9.
- [4] Desai, R. M., & Joshi, S. (2013). Collective action and community development: Evidence from self-help groups in rural India. World Bank Policy Research Working Paper 6547. The World Bank, Development Economics Vice Presidency, Partnerships, Capacity Building Unit.
- [5] Manyara, G., & Jones, E. (2007). Community-based tourism enterprises development in Kenya: An exploration of their potential as avenues of poverty reduction. Journal of Sustainable Tourism, 15(6), 628–644. <https://doi.org/10.2167/jost723.0>
- [6] Kementerian Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). ‘Peta Regulasi BUM DESA Sampai 10 November 2023’, pp. 1-7.
- [7] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- [9] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- [10] Muhammad, M. (2023). ‘Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah’, pp. 1-6.
- [11] Asih, P.S and Tanaya, P.E. (2023). ‘Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Penguatan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum’, Jurnal Kertha Semaya, 11(9), pp. 2006-2015. doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p01>.
- [12] Hidayat, Y., Permana, O., and Subekti, M. (2024). ‘Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Deskriptif di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung)’, Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), pp. 39-47.
- [13] Nurdin, M., Nurmaeta, St., and Tahir, M. (2014). ‘Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa’, Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(1), pp. 66-78.
- [14] Creswell W. John. 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [15] Frederick Whitney. (1960). The Element Of Research. New York :Prentice-Hall, Inc".
- [16] Sugiyono, (2016). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: alfabeta.
- [17] Miles, Mathew B., and A. Michael Huberman. 1994. Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis. London: Sage Publications.

